

BAB III

MEMBURUKNYA HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN QATAR, SERTA SANKSI EKONOMI ARAB SAUDI KEPADA QATAR

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hubungan buruk Arab Saudi dengan Qatar, dimulai dari awal memburuknya hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca dikudetanya Khalifa bin Hamad Al Thani sebagai emir Qatar hingga saat ini terjadinya pemutusan hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar. Selain itu bab ini membahas mengenai pemberian sanksi ekonomi oleh Arab Saudi terhadap Qatar, mengapa Arab Saudi memberikan sanksi ekonomi kepada Qatar dan apa tujuan pemberian sanksi ekonomi tersebut. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang tuntutan Arab Saudi kepada Qatar dan tidak efektifnya sanksi tersebut, serta dampak sanksi ekonomi tersebut bagi Qatar.

A. Memburuknya Hubungan Arab Saudi dan Qatar

Hubungan buruk Arab Saudi dan Qatar dimulai pada tahun 1995, lebih tepatnya pada saat emir Qatar saat itu, Khalifa bin Hamad Al Thani sedang berlibur di Jenewa, Swiss pada 26 Juni 1995 dikudeta dari pemerintahannya yang memaksanya untuk turun dari jabatannya sebagai emir Qatar pada saat itu juga (Kristanti, 2017). Kudeta itu sendiri dilakukan oleh Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang merupakan putra mahkota kerajaan Qatar dan anak dari Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, namun kudeta tersebut berlangsung tanpa adanya pertumpahan darah yang ditandai dengan pengiriman pasukan tentara ke istana Rayyan dan kediaman sang emir, serta ke bandara Doha untuk mencegah Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani kembali ke Qatar (Kristanti, 2017).

Karena kudeta ini hubungan Arab Saudi dan Qatar menjadi renggang dikarenakan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Arab Saudi dan independen, sedangkan emir terdahulu dikenal dekat

dengan Riyadh dan selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan Arab Saudi (Kristanti, 2017).

Disamping itu, tidak lama setelah aksi kudeta ini, Qatar menjalin hubungan dengan Iran dengan berbagi pengelolaan terhadap ladang gas alam terbesar di dunia yaitu North Field dan South Pars yang terletak di perbatasan antara Qatar dengan Iran (Prastiwi, 2017). Hal ini tentu saja membuat Arab Saudi semakin murka terhadap Qatar karena Arab Saudi sendiri memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Iran dan menganggap Iran bukan hanya sebagai musuh utamanya tetapi sebagai musuh bersama Negara-negara Teluk karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan Teluk.

Dengan pengelolaan gas alam North Field membuat Qatar menjadi salah satu Negara terkaya di dunia dan berjarak dengan Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk yang lebih menggantungkan Negara mereka dari hasil minyak bumi dan Qatar dapat menjauhkan dominasi Arab Saudi terhadap pemerintahan Qatar serta mengganggu dominasi Arab Saudi sebagai Negara pemimpin di kawasan Teluk (Prastiwi, 2017).

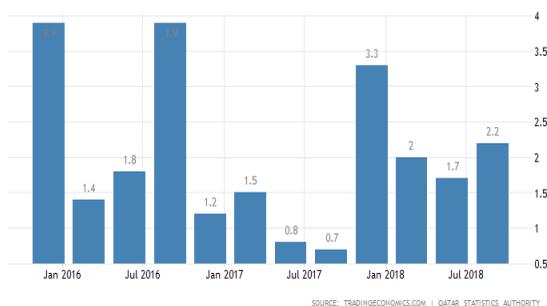
Saat ini Qatar merupakan produsen LNG (Liquified Natural Gas) terbesar di dunia dengan peningkatan kapasitas ekspor setiap tahun (Hukoomi : Qatar e-Government, Environment and Agriculture, 2019). Qatar Petroleum (QP) yang merupakan perusahaan minyak bumi milik pemerintah Qatar mengumumkan akan meningkatkan kapasitas produksi LNG dengan ekspansi sumber daya minyak bumi dan gas dan kapasitas produksi Qatar akan mencapai 110 juta ton per tahun (MTPA), meningkat sekitar 43% dari kapasitas produksi saat ini yang sekitar 77 MTPA (Shoeb, 2018).

Dengan ekspansi yang dilakukan oleh QP, proyek ini akan menghasilkan sekitar 32 MTPA LNG, 4.000 ton etana per hari, 260.000 barel kondensat per hari, 11.000 ton LPG per hari dan 20 ton helium murni per hari (Shoeb, 2018). Selain itu, untuk mendukung kesuksesan rencana ekspansi ini, Qatar

Petroleum juga membangun kerjasama dengan Chiyoda yang merupakan perusahaan dari Jepang, dimana Chiyoda akan melakukan Front End Engineering and Design (FEED) untuk peluasan ekspansi ladang minyak Qatar di wilayah utara (VOA Indonesia, Qatar Petroleum akan Tingkatkan Produksi Gas Lebih dari 20 Persen, 2018).

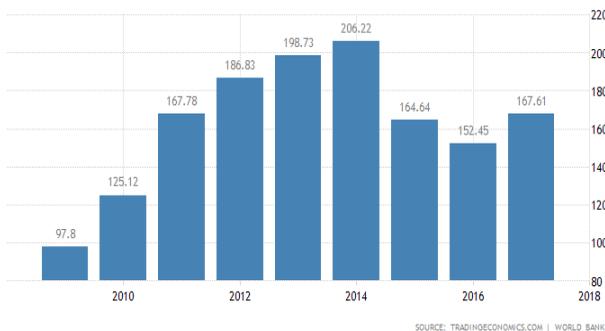
Qatar yang dulunya merupakan Negara bawahan (vassal state) Arab Saudi, berkat gas kekayaan gas alamnya dapat melepaskan diri dari dominasi Arab Saudi, dan hal ini juga yang menyebabkan Qatar dapat membuat kebijakannya sendiri yang bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh Arab Saudi (Prastiwi, 2017).

Pada 2017, GDP Qatar sebesar 167,61 miliar dolar AS dan nilai GDP mewakili 0,27% dari ekonomi dunia, dimana GDP rata-rata Qatar mencapai 42,81 miliar dolar AS dalam rentang tahun 1970 hingga 2017 dan mencapai rekor GDP tertingginya pada 2014 sebesar 206,22 miliar dolar AS dan rekor terendah pada 1970 sebesar 0,30 miliar dolar AS (Trading Economics, Qatar GDP Annual Growth Rate, 2019).



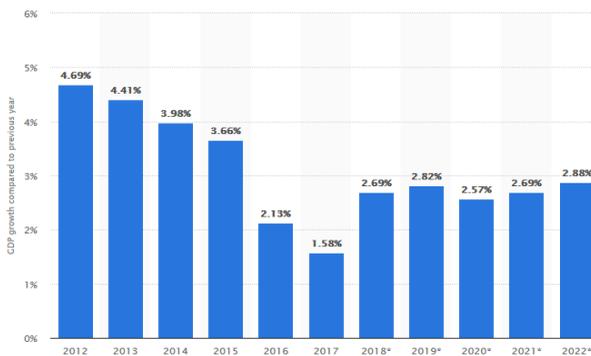
Grafik 3. 1 Qatar GDP Annual Growth Rate

Sumber : (Trading Economics, Qatar GDP Annual Growth Rate, 2019)



Grafik 3. 2 Qatar GDP

Sumber : (Trading Economics, Qatar GDP, 2019)



Grafik 3. 3 Qatar GDP Growth Rate 2012-2022

Sumber : (Statista, 2019)

Dengan jumlah GDP yang tinggi tersebut menjadikan tingkat kemiskinan di Qatar terus menurun secara drastis hingga sekarang dan pemerintah Qatar menghapuskan biaya pendidikan, listrik, air dan kesehatan, serta memberikan bantuan perumahan untuk rakyat dan setiap warga dijamin mendapatkan pendidikan (Susilo, 2017). Hal ini membuat Qatar

menjadi Negara terkaya di Timur Tengah dan masuk ke dalam daftar Negara terkaya di dunia tahun 2017.

Peringkat	Negara	GDP Perkapita 2017
1	Qatar	US\$ 129.726
2	Luxembourg	US\$ 101.936
3	Macao	US\$ 96.147
4	Singapore	US\$ 87.802
5	Brunei Darussalam	US\$ 79.710
6	Kuwait	US\$ 71.263
7	Ireland	US\$ 69.374
8	Norwegia	US\$ 69.296
9	Uni Emirat Arab	US\$ 67.696
10	San Marino	US\$ 64.443

Gambar 3. 1 Tabel Daftar Negara Terkaya 2017

Sumber : (Brian, 2019)

Hal ini yang menyebabkan hubungan Qatar dengan Arab Saudi semakin memburuk, bukan hanya karena kedekatan Qatar dengan Iran atas pembagian pengelolaan ladang gas North Field, tetapi juga karena kecemburuan Arab Saudi terhadap Qatar karena pertumbuhan ekonominya sangat pesat yang menjadikan Qatar sebagai Negara yang kekayaannya melampaui Arab Saudi sehingga dapat mengganggu posisi Arab Saudi sebagai Negara pemimpin di kawasan Teluk dan menjadi pesaing Arab Saudi dalam menancapkan dominasinya di kawasan Teluk.

Pada Juli 2013, Qatar menerima eksil Ikhwanul Muslimin yang diusir oleh militer Mesir dari wilayah Mesir yang kembali memperkeruh hubungan Qatar dengan Arab Saudi karena menurut Arab Saudi Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan organisasi terorisme terlarang dan dengan sikap Qatar yang menerima eksil Ikhwanul Muslimin dapat mengganggu stabilitas di kawasan Teluk (Nurjanah & Permadi, 2017).

Belum reda kekesalan Arab Saudi kepada Qatar, Qatar kembali semakin memperburuk hubungan antar kedua Negara dengan semakin memperkuat kerjasama produksi gas alam dengan Iran pada Januari 2014 dan pada Maret 2014, Arab Saudi menarik duta besarnya dari Qatar . Namun Arab Saudi tidak sendirian, penarikan duta besar tersebut diikuti juga oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain karena Qatar juga dianggap ikut campur dengan urusan dalam negeri Bahrain, sikap Qatar tersebut dianggap kembali memperkeruh stabilitas dikawasan Teluk (Nurjanah & Permadi, 2017).

Namun, pada 24 Mei 2017, Arab Saudi kembali dibuat naik pitam terhadap Qatar karena adanya berita yang ditulis oleh kantor berita Qatar mengenai pernyataan dari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang merupakan emir Qatar saat ini, dimana dalam berita itu melaporkan bahwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam upacara militer beridato dengan menyebut Iran adalah kekuatan besar dan juga mengatakan bahwa hubungan Qatar dan Israel dalam keadaan baik (Dewi, 2017).

Sehingga pada 26 Mei 2017, Arab Saudi langsung memblokir semua media Qatar termasuk stasiun televisi Al Jazeera akibat pemberitaan kontroversial tersebut yang menyebabkan pemerintah Qatar panik, kemudian mengatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar dan mengatakan bahwa kantor berita Qatar telah diretas (Dewi, 2017). Puncak dari kemarahan Arab Saudi terjadi pada 5 Juni 2017, dimana Arab Saudi beserta Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Libya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar secara tiba-tiba (Wadrianto, 2017). Buruknya hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar ini masih berlanjut hingga sekarang.

B. Sanksi Ekonomi Arab Saudi terhadap Qatar

Arab Saudi memberikan sanksi ekonomi kepada Qatar tidak lama setelah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Pemberian sanksi ekonomi ini sendiri diberikan karena Qatar ditenggarai masih memberikan

bantuan dan dukungan kepada kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Arab Saudi.

Setelah pemberian sanksi ekonomi tersebut, Arab Saudi memberikan 13 tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh Qatar agar sanksi ekonomi tersebut dicabut oleh Arab Saudi. 13 tuntutan Arab Saudi terhadap Qatar antara lain :

1. Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, serta mengusir anggota Pengawal Revolusi Iran dan menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Iran. Selain itu, perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi dari Amerika Serikat dan Internasional dengan cara yang tidak membahayakan Dewan Kerjasama Teluk (AlJazeera, 2017).
2. Segera menghentikan kerjasama militer dengan Turki dan mengusir militer Turki yang saat ini berada di Qatar (Gulf News, 2017).
3. Memutuskan segala ikatan dengan semua “organisasi, sekertarian, ideologis teroris” khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIS, Al-Qaeda, Fateh Al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan Hizbullah Lebanon. Secara resmi entitas ini dinyatakan sebagai kelompok teroris sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, serta setuju dengan segala pembaaruan di masa yang akan datang dari daftar ini (AlJazeera, 2017).
4. Menghentikan segala pendanaan terhadap individu, kelompok, maupun organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Amerika Serikat, dan Negara-negara lainnya (AlJazeera, 2017).
5. Segera menyerahkan tokoh-tokoh teroris, buron, dan orang-orang yang dicari oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, dan segera

kembalikan ke Negara asalnya. Selain itu, bekukan aset mereka dan berikan segala informasi terkait mengenai tempat tinggal, pergerakan, dan keuangan mereka (AlJazeera, 2017).

6. Menutup media Al Jazeera dan media lainnya (Deutsche Welle, 13 Tuntutan dan Ultimatum Arab Saudi Pada Qatar, 2017)
7. Menutup kantor berita yang didanai oleh Qatar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kantor berita tersebut antara lain mencakup Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadid dan Middle East Eye (Gulf News, 2017).
8. Mengakhiri untuk ikut campur tangan terhadap urusan internal Negara berdaulat. Berhenti untuk memberi kewarganegaraan Qatar terhadap warga Negara yang dicari oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, serta cabut kewarganegaraan Qatar untuk warga Negara yang dicari tersebut (Gulf News, 2017).
9. Membayar biaya perbaikan dan kompensasi untuk kehilangan nyawa dan hal lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir dan jumlahnya akan ditentukan dalam koordinasi dengan Qatar (Gulf News, 2017).
10. Menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan Negara-negara Teluk dan Arab lainnya, serta tentang masalah ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan Arab Saudi pada 2014 (Gulf News, 2017).
11. Hentikan hubungan dengan pihak oposisi politik di Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir. Serahkan file yang merinci mengenai hubungan serta dukungan Qatar terhadap pihak oposisi, dan kirimkan detail informasi pribadi mereka dan dukungan yang diberikan Qatar (AlJazeera, 2017).
12. Setuju dengan semua tuntutan yang diajukan terhitung 10 hari sejak Qatar menerima daftar

tersebut, atau daftar tersebut menjadi tidak valid (AlJazeera, 2017).

13. Setuju untuk audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, diikuti oleh audit triwulanan pada tahun kedua, dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya (AlJazeera, 2017).

Namun, Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan dari Arab Saudi. Melalui Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani yang merupakan Menteri Luar Negeri Qatar, menyebutkan tuntutan Arab Saudi yang salah satunya adalah tuntutan agar Qatar tidak mendukung terorisme merupakan permintaan yang tidak berdasar karena sama sekali tidak dilandasi dengan bukti yang kuat yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tuduhan (Dharma, 2017).

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani juga mengatakan kalau tuntutan itu seharusnya realistis dan dapat dilaksanakan, namun Arab Saudi justru mengajukan hal yang sebaliknya. Selain itu, tuntutan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan internasional dan sangat tidak diplomatis jika tuntutan tersebut diberikan begitu saja tanpa adanya jalur negosiasi sehingga Qatar menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut (Dharma, 2017).

Dampaknya bagi Qatar tentu saja sangat terasa, salah satunya adalah sulitnya pasokan pangan di Qatar, 80% pasokan pangan Qatar sendiri selama ini berasal dari Negara-negara Teluk (Nugroho, 2017). Sehingga pada saat pemberian sanksi ekonomi terhadap Qatar truk-truk pengirim pasokan makanan ke Qatar tertahan di perbatasan Arab Saudi dan dilarang untuk masuk ke Qatar. Dampak lain yaitu penerbangan Qatar dilarang untuk mendarat maupun melintasi wilayah udara dari Bahrain, Arab Saudi dan Mesir, sehingga penerbangan Qatar harus dialihkan melalui jalur lain yang lebih jauh dan mengurangi pemasukan bagi Qatar (Priyambodo, 2017).

Selain itu, warga Qatar tidak bisa melakukan ibadah haji di Arab Saudi, dimana Arab Saudi menutup sistem pendaftaran elektronik yang diselama ini digunakan oleh agen-agen di Qatar untuk mendapatkan izin bagi peziarah dan calon Jemaah haji Qatar. Menurut Abdullah al Kaabi yan merupakan anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia Qatar, penduduk Qatar tidak bisa menapatkan visa ke Arab Saudi karena terputusnya hubungan diplomasi Arab Saudi dengan Qatar (Pars Today, Warga Qatar Tidak Bisa Tunaikan Ibadah Haji, 2018).

Qatar juga kehilangan banyak pemasukan akibat larangan Arab Saudi kepada warga negaranya untuk masuk ke wilayah Qatar, dan penduduk Qatar dilarang untuk memasuki Arab Saudi, bahkan penduduk Qatar yang tinggal dan bekerja di Arab Saudi serta Negara Teluk yang lain diperintahkan untuk segera kembali ke Qatar sehingga Qatar (Dewi, 2017).

Selain itu, Arab Saudi juga berencana membangun sebuah kanal di wilayah perbatasan Arab Saudi dengan Qatar dengan tujuan untuk memisahkan Qatar dari dataran Arab dan menjadikannya sebagai pulau tersendiri. Kanal itu sendiri rencananya akan memiliki panjang 60 kilometer, lebar 200 meter, dan akan memiliki kedalaman 15-20 meter, dan jika pembangunan kanal ini terwujud, maka jalur darat perdangan Qatar yang selama ini harus melalu Arab Saudi akan benar-benar terputus sepenuhnya (Berlianto, 2018).



Gambar 3. 2 Rencana Pembangunan Kanal Arab Saudi

Sumber : (Berlianto, 2018)

Namun, bukan hanya Qatar yang merasakan dampak dari sanksi ekonomi tersebut, Arab Saudi juga turut merasakan dampaknya dimana pemasukan Arab Saudi berkurang karena selama ini Qatar mengimpor 80% bahan makanannya dari Arab Saudi dan Negara-negara Teluk (Nugroho, 2017). Selain itu, Arab Saudi berharap dengan pemberian sanksi ini Qatar akan menuruti kemauan Arab Saudi untuk memutus hubungan dengan Iran. Namun, Qatar malah semakin mendekatkan diri ke Iran karena Iran membantu Qatar untuk memenuhi bahan makanannya seperti buah dan sayuran yang dikirim melalui jalur udara dan akan memberangkatkan 3 kapal yang akan membawa 350 ton bahan makanan ke Qatar (BBC, Krisis Qatar: Iran kirim lima pesawat bermuatan makanan, 2017).